

Peran Auditor dalam Transparansi Keuangan Daerah: Pemeriksaan SPJ Fungsional pada SKPD Kabupaten Nabire

Heryanto Talantan^{1*}, Baharuddin², Kristian H.P Lambe³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

talantanheryanto@gmail.com

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran auditor dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah melalui pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Nabire. Transparansi keuangan merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sementara auditor berperan penting sebagai pengawas sekaligus pembina dalam proses pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Nabire. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor berperan signifikan dalam memastikan kepatuhan SKPD terhadap regulasi, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta mendorong perbaikan pengelolaan keuangan. Faktor internal seperti kompetensi, integritas, dan pengalaman auditor, serta faktor eksternal seperti dukungan pimpinan dan kesiapan dokumen SKPD, memengaruhi efektivitas pemeriksaan. Pemeriksaan SPJ terbukti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan SKPD, memperkuat akuntabilitas, dan membangun budaya transparansi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan sistem digital audit, serta penguatan koordinasi lintas lembaga untuk mewujudkan transparansi keuangan daerah secara optimal.

Kata kunci: auditor, transparansi keuangan, SPJ fungsional, akuntabilitas publik, Nabire.

Abstract

This study aims to analyze the role of auditors in promoting regional financial transparency through the examination of Functional Accountability Reports (SPJ) within Local Government Work Units (SKPD) in Nabire Regency. Financial transparency is a key pillar of accountable governance, with auditors playing a crucial role as both supervisors and facilitators in public financial management. This research employed a qualitative approach with a case study at the Nabire Regency Inspectorate. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were examined using thematic analysis. The findings reveal that auditors significantly contribute to ensuring SKPD compliance with regulations, detecting potential irregularities, and encouraging improvements in financial management. Internal factors such as competence, integrity, and experience, along with external factors such as leadership support and document readiness, influence audit effectiveness. Functional SPJ examinations have been proven to enhance the quality of SKPD financial reporting, strengthen accountability, and foster a culture of transparency. The study recommends continuous auditor capacity building, the adoption of digital auditing systems, and strengthened inter-agency coordination to achieve optimal regional financial transparency.

Keywords: auditor, financial transparency, functional accountability report, public accountability, Nabire.

PENDAHULUAN

Transparansi keuangan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel. Transparansi yang rendah berpotensi menimbulkan praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Arifin & Nugroho, 2022). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 36% pemerintah daerah di Indonesia masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi (BPK RI, 2023). Di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Nabire, permasalahan utama yang ditemukan adalah keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ), dokumen pendukung yang tidak lengkap, serta kurang optimalnya peran auditor internal dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur (Inspektorat Papua, 2023).

Tabel 1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2020–2023

Tahun	Jumlah Pemda	WTP	WDP	TMP
2020	29	12	15	2
2021	29	14	13	2
2022	29	15	12	2
2023	29	17	10	2

Sumber: BPK RI (2023)

Peran auditor, khususnya auditor internal pada inspektorat daerah, menjadi sangat penting dalam mendukung transparansi keuangan daerah. Auditor tidak hanya bertugas memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah (Sari & Putri, 2021). Pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional merupakan

salah satu instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan transparan (Wardhana & Pratama, 2022). Namun, efektivitas pemeriksaan SPJ masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya auditor, lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya komitmen dari organisasi perangkat daerah (OPD) (Rahmawati & Arif, 2022; Susanto et al., 2023).

Penelitian ini menjadi penting karena transparansi keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas publik, tetapi juga berdampak pada efektivitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2023). Kabupaten Nabire, sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua, menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan fokus pada peran auditor dalam pemeriksaan SPJ fungsional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan sistem pengawasan internal serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran auditor dalam pemeriksaan SPJ fungsional pada SKPD di Kabupaten Nabire?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan SPJ fungsional dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah?
3. Bagaimana kontribusi pemeriksaan SPJ fungsional terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah?

TINJAUAN LITERATUR

Transparansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Publik

Transparansi keuangan daerah dipahami sebagai keterbukaan informasi pengelolaan dana publik agar mudah diakses dan dipahami masyarakat, sekaligus menjadi sarana pencegahan penyalahgunaan anggaran (LPKN Training Center, 2023). Transparansi yang baik memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi publik, dan menurunkan risiko korupsi (BPK Wanggar, 2024; Khikmah & Purwanto, 2022). Namun implementasinya kerap terkendala kesiapan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah (BPK Aceh, 2025).

Peran Auditor dalam Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah

Auditor—khususnya auditor internal pada inspektorat—berperan menilai kepatuhan, meninjau kewajaran pelaporan, mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mendeteksi indikasi kecurangan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Kolaborasi auditor internal–eksternal (Inspektorat–BPK) memperkuat kualitas audit dan tindak lanjut rekomendasi (Nugroho, 2022). Audit publik yang efektif juga dikaitkan dengan penurunan korupsi melalui peran lembaga pemeriksa eksternal (BPK RI, 2020). Secara empiris, peran audit internal berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Purnomo, 2021; Wulandari, 2023).

SPJ Fungsional sebagai Instrumen Akuntabilitas

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional adalah bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada setiap SKPD yang melaksanakan kegiatan tertentu, disampaikan kepada Pengelola Keuangan Daerah/BUD untuk verifikasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020). Pemeriksaan atas SPJ Fungsional bertujuan memastikan transaksi sesuai regulasi, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendorong perbaikan pengelolaan (Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, 2024). Temuan umum pada pemeriksaan meliputi ketidaksesuaian perjalanan dinas, administrasi barang yang tidak tertib, dan pembentukan tim yang tidak sesuai ketentuan—menunjukkan area risiko yang perlu pembenahan sistematis (Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).

Digitalisasi Audit Pemerintah Daerah

Penerapan **smart auditing** dan sistem pemeriksaan berbasis elektronik memungkinkan akses real-time atas dokumen pertanggungjawaban, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi temuan (Bakti News, 2023). Inovasi ini sejalan dengan tuntutan efisiensi dan transparansi, serta menjadi respon terhadap keterbatasan SDM dan geografis di banyak daerah (BPK Aceh, 2025; Bakti News, 2023).

Bukti Empiris Terkini

Sejumlah studi pada 2020–2025 memperlihatkan korelasi positif antara

pengawasan/pemeriksaan fungsional, pengendalian intern, dan audit internal dengan akuntabilitas serta kualitas pelaporan keuangan daerah. Safitri (2022) menemukan pengawasan fungsional berpengaruh pada akuntabilitas publik; Hafizhoh dan Misra (2023) menunjukkan peran audit internal meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD; Irianto et al. (2024) menekankan penguatan peran auditor BPKP dalam SPIP; Gudipung et al. (2022) membuktikan pengendalian internal dan pengawasan keuangan berpengaruh pada keandalan laporan; Musthafa dan Adiputera (2023) serta Tobroni (2024) mengonfirmasi pengaruh signifikan audit/pengawasan terhadap kualitas laporan dan kinerja pengelolaan.

Tabel 2. Ringkasan temuan empiris terkait audit/pengawasan dan transparansi/akuntabilitas

Studi	Konteks	Fokus	Temuan Utama
Safitri (2022)	SKPD Kab. Pemalang	Audit kinerja, SPI, pengawasan fungsional, pelaporan kinerja → akuntabilitas	Pengawasan fungsional → akuntabilitas publik (positif signifikan)
Hafizhoh & Misra (2023)	Kota Padang Panjang	Kompetensi PPK, peran audit internal → kualitas LK SKPD	Peran audit internal → kualitas laporan (positif)
Irianto et al. (2024)	BPKP	Penguatan peran auditor dalam SPIP	Pelatihan & evaluasi → peningkatan peran dalam transparansi & akuntabilitas
Gudipung et al. (2022)	Kab. Sikka	SPI & pengawasan keuangan → keandalan LK	SPI & pengawasan → keandalan LK (signifikan)
Musthafa & Adiputera (2023)	Kota Banjarmasin	Akuntabilitas, SPI, transparansi, pengawasan → kualitas LK & kinerja	Semua faktor → signifikan
Tobroni (2024)	Kota Palembang	Audit kinerja & pengawasan fungsional → akuntabilitas	Keduanya → akuntabilitas publik (positif)

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Semua temuan di atas mempertegas peran strategis audit/pengawasan—termasuk pemeriksaan SPJ Fungsional—dalam

membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Research Gap

Meskipun banyak studi menyoroti pengaruh audit internal, pengawasan fungsional, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan serta akuntabilitas, kajian yang fokus khusus pada mekanisme pemeriksaan SPJ Fungsional di konteks wilayah Papua, terutama Kabupaten Nabire, masih terbatas. Keterbatasan adopsi teknologi audit, variasi kapasitas auditor, dan dinamika kesiapan dokumen SKPD menghadirkan ruang kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual berbasis praktik lapangan inspektorat daerah setempat (Inspektorat Kabupaten Nabire, 2021–2025; Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan desain studi kasus** yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran auditor dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah melalui pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Nabire. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi informan dalam konteks sosial yang nyata (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017). Desain studi kasus dipandang sesuai karena fokus penelitian diarahkan pada situasi spesifik di Inspektorat Kabupaten Nabire, yang berfungsi sebagai unit analisis utama (Yin, 2018).

Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan SPJ fungsional di SKPD Kabupaten Nabire, termasuk auditor internal (Inspektorat), pejabat pengelola keuangan SKPD, serta pejabat terkait yang memahami proses pertanggungjawaban keuangan daerah. **Pemilihan sampel** dilakukan dengan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan relevansi terhadap fokus penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Sebanyak lima informan kunci diwawancarai secara mendalam, yang terdiri atas auditor pelaksana, pejabat struktural inspektorat, dan pejabat pengelola keuangan SKPD. Jumlah ini dianggap memadai karena telah memenuhi

prinsip ketercukupan data (data saturation), di mana informasi yang diperoleh telah menunjukkan pengulangan tema dan tidak lagi menghasilkan temuan baru (Guest, Namey, & Chen, 2020).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dengan lokasi utama di Kantor Inspektorat Kabupaten Nabire serta beberapa SKPD yang menjadi objek pemeriksaan SPJ fungsional. Kabupaten Nabire dipilih karena merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini. **Waktu penelitian berlangsung selama dua bulan**, dimulai pada Juni hingga Juli 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan verifikasi temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu **wawancara mendalam (in-depth interviews)**, **observasi partisipatif**, dan **analisis dokumentasi**. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi dan pengalaman informan mengenai proses pemeriksaan SPJ fungsional. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami langsung proses audit dan interaksi auditor dengan SKPD, sedangkan analisis dokumentasi dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan, dokumen SPJ, serta regulasi yang relevan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Data hasil wawancara ditranskrip secara verbatim, kemudian dilakukan proses **coding** untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran auditor, faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan, serta kontribusi pemeriksaan SPJ terhadap transparansi keuangan daerah. Validitas data dijaga melalui **triangulasi sumber dan metode**, **member checking** kepada informan, serta **audit trail** untuk memastikan keterlacakan proses penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

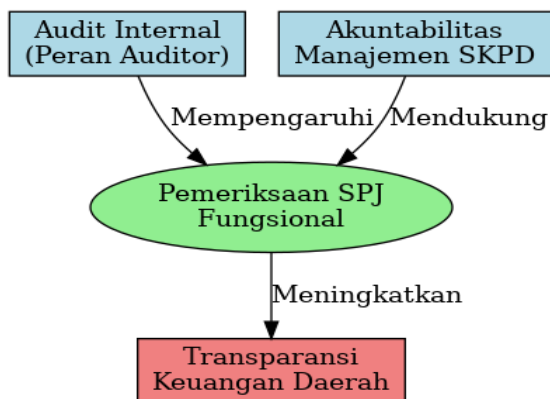
Pendekatan metodologis ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pemeriksaan SPJ fungsional berkontribusi terhadap transparansi keuangan daerah, sekaligus menghasilkan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan praktik audit internal di pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Nabire.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini berlandaskan pada teori pengawasan internal dan akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya peran auditor dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (Kementerian Keuangan RI, 2021; Khikmah & Purwanto, 2022). Auditor berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses perbaikan sistem pengelolaan keuangan publik melalui pemeriksaan yang sistematis dan berkelanjutan (Purnomo, 2021; Nugroho, 2022).

Dalam konteks ini, pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional diposisikan sebagai mekanisme kunci yang menjembatani peran auditor dengan tercapainya transparansi keuangan daerah. SPJ fungsional tidak hanya menjadi bukti pertanggungjawaban formal, tetapi juga sarana evaluasi dan pencegahan penyimpangan anggaran (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020; Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, 2024).

Kerangka berpikir yang disajikan pada **Gambar 1** mengilustrasikan hubungan antara Peran auditor dan akuntabilitas manajemen SKPD diidentifikasi sebagai faktor utama yang dapat memengaruhi efektivitas pemeriksaan SPJ fungsional. Selanjutnya, pemeriksaan SPJ fungsional berperan sebagai variabel mediasi yang menentukan keberhasilan pencapaian transparansi keuangan daerah. Model ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoretis mengenai bagaimana mekanisme pengawasan internal melalui SPJ fungsional dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Nabire.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 1. Kerangka Pikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima informan kunci yang dipilih secara purposive sesuai keterlibatan mereka dalam pemeriksaan SPJ fungsional pada SKPD di Kabupaten Nabire. Karakteristik responden meliputi jabatan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja, sebagaimana dirangkum pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Karakteristik Responden Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Kerja (Tahun)
I1	Auditor Pelaksana (Inspektorat)	S.Tr.IP (Administrasi Publik)	6
I2	Auditor Pelaksana (Inspektorat)	S.E. (Ekonomi)	5
I3	PPUPD Ahli Pertama (Inspektorat)	S.H. (Hukum)	8
I4	Bendahara Pengeluaran (Inspektorat)	S.M. (Manajemen)	10
I5	Irban III (Inspektorat)	S.STP (Pemerintahan)	12

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Karakteristik ini menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah serta pemeriksaan SPJ, yang memperkuat kredibilitas data penelitian (Guest et al., 2020).

Hasil Wawancara

Hasil wawancara mendalam mengungkap beberapa tema utama terkait peran auditor, faktor pendukung/hambatan, dan kontribusi pemeriksaan SPJ terhadap transparansi keuangan daerah. **Tabel 4** merangkum temuan kunci wawancara yang mendukung analisis tematik penelitian ini.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Wawancara

Tema Utama	Pernyataan Informan
Peran Auditor	Auditor memeriksa kesesuaian dokumen SPJ dengan regulasi, melakukan verifikasi lapangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan (I1, I2, I3).
Faktor Internal Auditor	Kompetensi, pemahaman regulasi, dan integritas merupakan faktor utama efektivitas pemeriksaan (I3, I5).

Tema Utama	Pernyataan Informan
Faktor Eksternal	Keterbukaan SKPD, dukungan pimpinan, dan ketersediaan dokumen sangat mempengaruhi proses audit (I2, I4, I5).
Kontribusi Pemeriksaan SPJ	Pemeriksaan SPJ meningkatkan ketertiban administrasi, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas SKPD (I4, I5).
Hambatan Utama	Keterbatasan SDM auditor, keterlambatan dokumen, dan perubahan regulasi menjadi tantangan utama (I1, I2, I3).

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pembahasan

Peran Auditor dalam Pemeriksaan SPJ Fungsional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor berperan penting dalam memastikan kepatuhan SKPD terhadap regulasi keuangan daerah. Auditor melakukan pemeriksaan dokumen SPJ, verifikasi lapangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan, yang sejalan dengan konsep pengawasan internal menurut Arens et al. (2017) bahwa audit internal merupakan mekanisme kontrol penting dalam tata kelola sektor publik. Temuan ini mendukung hasil penelitian Purnomo (2021) dan Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan

Efektivitas pemeriksaan SPJ dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kompetensi teknis, integritas, dan pengalaman auditor. Faktor eksternal meliputi dukungan pimpinan daerah, keterbukaan SKPD, dan ketersediaan data. Temuan ini selaras dengan teori efektivitas auditor yang menyebutkan bahwa kualitas audit sangat ditentukan oleh kompetensi auditor dan lingkungan organisasinya (Mahmudah & Riyanto, 2016; Hafizhoh & Misra, 2023). Hambatan seperti keterbatasan SDM dan keterlambatan dokumen menunjukkan perlunya penguatan kapasitas auditor dan pemanfaatan teknologi audit digital (Bakti News, 2023).

Kontribusi Pemeriksaan SPJ terhadap Transparansi Keuangan

Pemeriksaan SPJ fungsional terbukti berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Safitri (2022) dan Gudipung et al. (2022) yang menunjukkan bahwa

pengawasan fungsional dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Auditor tidak hanya berperan sebagai pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator pembenahan administrasi SKPD, yang berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan jangka panjang.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan, yakni: (1) auditor memiliki peran strategis dalam pemeriksaan SPJ fungsional; (2) efektivitas pemeriksaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal; (3) pemeriksaan SPJ berkontribusi signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan berkelanjutan, implementasi audit berbasis digital untuk efisiensi, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Implikasi teoretisnya, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan SPJ dapat dipandang sebagai instrumen mediasi penting dalam kerangka tata kelola keuangan daerah berbasis good governance (World Bank, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran auditor dalam pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional pada SKPD di Kabupaten Nabire sangat signifikan dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah. Auditor tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai agen perubahan melalui pemberian rekomendasi perbaikan dan pembinaan teknis. Efektivitas pemeriksaan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kompetensi, integritas, dan pengalaman auditor, serta faktor eksternal, berupa dukungan pimpinan daerah, keterbukaan SKPD, dan ketersediaan dokumen. Pemeriksaan SPJ fungsional berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, akuntabilitas, dan budaya transparansi di lingkungan pemerintah daerah. Hasil ini menegaskan pentingnya pemeriksaan SPJ sebagai instrumen pengawasan internal yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Saran

1. **Bagi Inspektorat Kabupaten Nabire,** perlu dilakukan **peningkatan kapasitas**

auditor melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesional, dan pemanfaatan teknologi audit berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan.

2. **Bagi SKPD di Kabupaten Nabire**, disarankan untuk **meningkatkan pemahaman dan kepatuhan** terhadap regulasi keuangan, menyiapkan dokumen pertanggungjawaban secara lengkap dan tepat waktu, serta bersikap kooperatif dalam setiap proses audit.
3. **Bagi Pemerintah Daerah**, diperlukan **penguatan kelembagaan Inspektorat**, baik dari sisi sumber daya manusia, pendanaan, maupun infrastruktur pendukung audit, serta penyusunan kebijakan pengawasan internal yang lebih sistematis.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar daerah guna memperkaya pemahaman tentang efektivitas pemeriksaan SPJ fungsional dalam berbagai konteks pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peran audit BPK dalam mengurangi korupsi*. BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023*. BPK RI.
- Bakti News. (2023). Smart auditing untuk penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah. *Bakti News*.
<https://www.bakti.go.id/smart-auditing>
- BPK Aceh. (2025). *Analisis efisiensi dan transparansi keuangan pemerintah daerah*. BPK Aceh.
- BPK Wanggar. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas: Pentingnya audit keuangan pemerintah daerah*. BPK Wanggar.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Penatausahaan dan perbendaharaan daerah*. Kementerian Keuangan RI.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLoS ONE*, 15(5), e0232076.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Gudipung, H. A., Lalang, M. Y., & Suharto, T. (2022). Pengendalian internal dan pengawasan keuangan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 112–125.
- Hafizhoh, P., & Misra, F. (2023). Peran audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 15(1), 55–68.
- Halik, M. Y., Halik, J. B., Sumanti, D. A. F., & Mangampa, S. N. M. (2024). Auditor's Individual Morality In Moderating The Love Of Money And Machiavellian Characteristics Of Accounting Fraud Tendencies. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11), 2889–2903.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i11.p11>
- Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Laporan hasil pengawasan fungsional 2024*. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Inspektorat Papua. (2023). *Laporan hasil pengawasan daerah Provinsi Papua tahun 2023*. Inspektorat Provinsi Papua.
- Irianto, G., Pratiwi, R., & Nugraha, D. (2024). Penguatan peran auditor BPKP dalam sistem pengendalian intern pemerintah. *Jurnal Sistem Akuntansi Publik*, 11(3), 201–215.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Implementasi peran auditor internal dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan*. Kemenkeu RI.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2022). Transparansi, akuntabilitas, fairness laporan keuangan daerah dan pencegahan korupsi. *Jurnal Good Governance*, 8(2),

- 87–98.
- Lambe, K. H. P., Tandi, A., & Pangalo, T. (2023). ANALYSIS OF EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF NORTH TORAJA REGENCY. *Journal of Entrepreneur Business and Management (JEBM)*, 1(3), 87–98. <https://journal.amkop.id/jebm/article/view/111>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- LPKN Training Center. (2023). *Panduan mengelola keuangan pemerintah daerah yang transparan*. Lembaga Pengembangan Keuangan Negara.
- Mahmudah, I., & Riyanto, S. (2016). Kompetensi auditor dan efektivitas audit internal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(1), 45–58.
- Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171–180. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Musthafa, R., & Adiputera, Y. (2023). Pengaruh akuntabilitas, pengendalian intern, dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(2), 142–156.
- Nugroho, A. (2022). Peran inspektorat sebagai auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 5(1), 21–34.
- Palalangan, C. A., Halik, J. B., & Halik, M. Y. (2017). Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Ukur Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(2), 42–58. corolus@ukipaulus.ac.id
- Paranoan, N., Sabandar, S. Y., Paranoan, A., Pali, E., & Pasulu, I. (2022). The Effect of Fraud Prevention, Fraud Detection, Investigative Audits, and Professionalism of Auditors on Efforts to Minimize Fraud in the Financial Statements of Companies in Makassar City, Indonesia. *WSEAS Transactions on Information Science and Applications*, 19, 54–62. <https://doi.org/10.37394/23209.2022.19.6>
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295>
- Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 108–119. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738>
- Purnomo, A. (2021). Peran audit internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 33–44.
- Rahmawati, D., & Arif, S. (2022). Tantangan efektivitas audit internal di pemerintah daerah: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Daerah*, 14(2), 76–89.
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Safitri, E. A. (2022). Pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik SKPD. *Jurnal Akuntabilitas dan Audit*, 17(1), 23–36.
- Sahuleka, E. C., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nabire. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 165–172. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/881>

- Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota : Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Sari, N., & Putri, A. (2021). Peran auditor internal dalam mewujudkan good governance pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(2), 44–58.
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141–155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPSTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 61–69. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990/>
- Susanto, T., Wijaya, E., & Ramadhan, R. (2023). Hambatan dan solusi implementasi audit berbasis teknologi di pemerintahan daerah. *Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan*, 2(1), 55–70.
- Tobroni, M. R. (2024). Audit kinerja dan pengawasan fungsional sebagai determinan akuntabilitas publik pemerintah daerah. *Jurnal Audit dan Akuntabilitas*, 12(1), 88–101.
- Wardhana, B., & Pratama, Y. (2022). Peran pemeriksaan SPJ fungsional dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2), 101–114.
- World Bank. (2023). *Good governance in public financial management: Strengthening accountability and transparency*. World Bank.
- Wulandari, D. (2023). Pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 12(1), 65–77.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.